

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA PAMPANG TANGGUK JAYA**

(Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)



Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tuga-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Siyasah

**Oleh:**

**Tiyas Ayu Yulinda**

**1321020129**

**Jurusan: Siyasah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
1439/2017**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA PAMPANG TANGGUK JAYA**

(Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tuga-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Siyasah

**Oleh:**

**Tiyas Ayu Yulinda**

**1321020129**

**Jurusan: Siyasah**

**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag**

**Pembimbing II : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439/2017**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA PAMPANG TANGGUK JAYA

(Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

Tiyas Ayu Yulinda

Kajian skripsi ini mengungkap tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya. Partisipasi politik adalah suatu mekanisme penting dalam suatu negara, Pada permasalahan yang ada pada saat ini partisipasi politik masyarakat tepatnya di daerah Pampang Tangguk Jaya Kec.Sungkai Tengah cenderung kurang disebabkan oleh berbagai alasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara adalah faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan faktor personal individu lainnya. Tipologi partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya yaitu terdiri dari tipologi pasif dan spector. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya dan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian *fiel research* (penelitian lapangan) dengan sifat penelitian yaitu empiris analitik. Metode pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara sebagai metode utama dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Pada bagian akhir penelitian ini disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara masih cenderung kurang baik dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang masih cenderung rendah yang disebabkan oleh faktor pendidikan yang masih rendah, perbedaan-perbedaan ekonomi, sampai kepada lingkungan sosial masyarakat, dan juga faktor personal individu masing-masing. Kurangnya kesadaran politik masyarakat mengakibatkan banyaknya suara masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya banyak di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik. Tinjauan Islam terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara yaitu Islam tidak mengharuskan model pasti dalam menyampaikan aspirasi politiknya, konsep Islam dalam partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap pemimpin. Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam menyampaikan aspirasi politiknya berbeda-beda, perbedaan pendapat dan kepentingan merupakan hal yang wajar. Tetapi prinsip menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kunci utama kekuatan dan kemenangan. Selama persatuan dan kesatuan masih dibina oleh aqidah yang kokoh. Namun masih ada masyarakat yang tidak mengikuti nilai Islam karena masih banyak masyarakat yang suaranya dapat dibeli oleh oknum-oknum tertentu yang artinya *money politic*.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT DESA PAMPANG  
TANGGUK JAYA**  
Nama : **TIYAS AYU YULINDA**  
Npm : **1321020129**  
Program Studi : **Siyasah**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk diMunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan  
Lampung.

**Pembimbing I**

**Drs. H.Mundzir HZ. M. Ag**  
**NIP. 195607271988031001**

**Pembimbing II**

**Drs. Susiadi AS, M.Sos.I**  
**NIP.195808171993031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**

**Drs.Susiadi AS, M. Sos.I**  
**NIP. 195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DESA  
PAMPANG TANGGUK JAYA**, disusun oleh **Tiyas Ayu  
Yulinda**, NPM1321020129, Program Studi **Siyasah**, telah  
diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari / Tanggal:

**TIM PENGUJI :**

Ketua : **Dr. Jayusman, M.Ag**

Sekretaris : **Arif Fikri, SH., M.Ag**

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., MH.**

Penguji II : **Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*“ sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk  
memberikan kepercayaan kepada mereka yang dipercaya untuk  
melaksanakan amanat tersebut. ”*



## PERSEMBAHAN

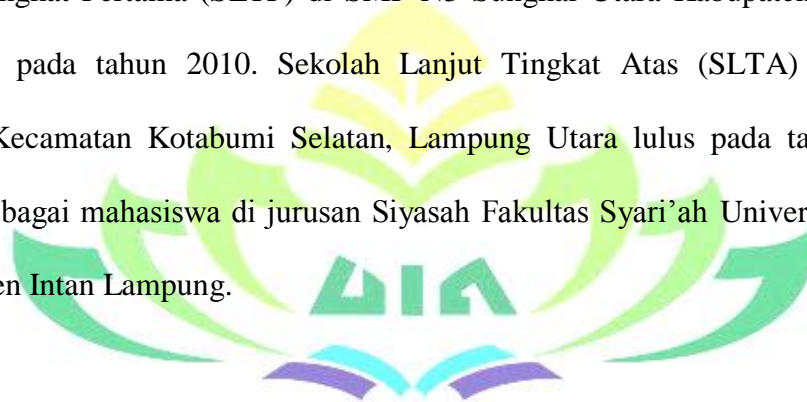
Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibu Nurliana dan Ayah Asnawi tercinta yang telah ikhlas dan sabar membesarkan, mendidik dan selalu mendo'akan.
2. Kepada nenek tersayang yang selalu menasehatiku, ayuk ku tersayang Nanda, dan adik-adik ku yang selalu jadi semangatku Revi, Vani, dan Viola serta adik sepupuku Andika Dan Firman yang selalu senantiasa membantu dan memberikan do'a untuk kelulusan ku.
3. Sahabat-sahabatku Wardah, Melta, Yuni, Mareza, Putri, Dea, Waya, Ocha, Fesa, Qori dan teman-temanku angkatan 13 Siyasah/A yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan kepadaku.
4. Almamater tercinta 'UIN Raden Intan Lampung'

## **RIWAYAT HIDUP**

Tiyas Ayu Yulinda, seorang anak yang dilahirkan di Desa Kotanegara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, Lampung tepatnya pada tanggal 29 July 1996 yang merupakan anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan bapak Asnawi dan ibu Nurliana.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) RA Assalam Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara, Lampung lulus pada tahun 2001. Sekolah Dasar (SDN) 1 Kotanegara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP N3 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara lulus pada tahun 2010. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) SMA N3 Kotabumi Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara lulus pada tahun 2013. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada jurusan Siyasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr.Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada mahasiswa;
2. Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Drs.Susiadi AS, M.Sos.I selaku pembimbing II, yang telah banyak menyediakan waktu dan memberikan bimbingan yang ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Frengki, M .Si Selaku sekretaris Jurusan Siyasah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Siyasah yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
5. Sahabat-sahabat ku Wardah, Melita, Yuni, Mareza yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat ku angkatan 2013 Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung yang sama-sama semangat berjuang dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, skripsi ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi intelektual bagi kemajuan pemikiran mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta masyarakat pada umumnya. *Amin Yarobbal'Alamin*

Bandar Lampung, 13 Mei 2017

Penulis

Tiyas Ayu Yulinda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PARTISIPASI POLITIK	
A. Pengertian Partisipasi Politik masyarakat .....	18
B. Faktor-Faktor Partisipasi Politik .....	21
C. Partisipasi Politik Menurut Hukum Islam .....	38
 BAB III : DESKRIPTIF PARTISIPASI POLITIK DESA TERTINGGAL	
A. Sejarah Singkat Desa Pampang Tangguk Jaya .....	52

B. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Saat Pemilu.....	56
C. Faktor penghambat dan Pendorong Partisipasi Politik Pada Masyarakat.....	62
D. Pendapat Warga Tentang Pemilu Didaerah Setempat .....	66

#### BAB IV : ANALISIS

A. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat didesa tertinggal .....	69
B. Perspektif Hukum Islam terhadap partisipasi politik pada masyarakat didesa tertinggal .....	71

#### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

#### LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Bagi Masyarakat (Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengan Kabupaten Lampung Utara) untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan, antara lain:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan<sup>1</sup>.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Islam adalah agama yang diturunkan kepada nabi muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir jaman. Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

<sup>2</sup> Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, ( Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008), h.7.s

Partisipasi Politik adalah keikutsertaan masyarakat atau sekelompok orang dalam mengambil peran aktivitas atau kegiatan politik negara yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan suatu negara untuk meraih kekuasaan konstitusional.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka) dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut<sup>3</sup>.

Desa Pampang Tangguk Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Secara administratif Desa Pampang Tangguk Jaya mulai berdiri pada Tahun 2000 yang merupakan pemekaran dari desa Kotanegara. Desa ini merupakan desa kecil di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten dengan memiliki luas wilayah 983,15 Ha.

Berdasarkan istilah-istilah diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya adalah pandangan yang berpijak pada syari'at Islam tentang partisipasi atau keikutsertaan masyarakat atau sekelompok orang terhadap politik atau kegiatan keputusan suatu negara untuk meraih kekuasaan konstitusional di daerah lingkup desa yaitu Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>3</sup>R Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Batam: Karisma, 2006), h.438

## **B. Alasan memilih judul**

Yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut diatas adalah:

1. Karna pada permasalahan yang ada pada saat ini partisipasi politik didesa tertinggal, tepatnya di daerah Pampang Tangguk Jaya Kec.Sungkai Tengah cenderung kurang disebabkan oleh berbagai alasan.
  2. Sedangkan partisipasi politik dalam pandangan islam mengalami peningkatan kesadaran dan wawasan keislaman muslim, karna terkuaknya kenyataan bahwa penjajahan siyasah yang selama ini berlangsung telah menghancurkan segala milik umat, dan telah muncul suatu kesadaran baru dari kalangan kaum muslimin bahwa siyasah merupakan bagian dari kehidupan lainnya seperti: ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.
- Hal-hal tersebutlah yang mengacu atau membuat penulis tertarik ingin mengetahui keberagaman nya.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem demokrasi liberal. Salah satu contoh nya adalah dalam pemilu atau pemilihan umum, partisipasi politik dalam pemilu adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Kamared El Pakpahan, "*Parisipasi Mayarakat Dalam Politik*" (On-Line), Tersedia di [www.elpakpahantampan.wordpress.com](http://www.elpakpahantampan.wordpress.com) 19 September 2013.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik .

Pengalaman pemilu 2014 di Desa Pampang Tangguk Jayamenunjukan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya, hal tersebut banyak dilatar belakangi oleh pengaruh tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kesadaran dalam partisipasi politik<sup>5</sup>.

Dilain pihak apa yang dihasilkan dalam pemilu juga melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan tersebut disuarakan untuk banyak pihak, kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemimpin antara lain melahirkan sikap absen dalam pemilu. Lebih jauh dari itu sikap tidak mau berpartisipasi dalam pemilu itu diungkapkan secara atraktif, sehingga secara implisit seolah-olah pihak yang kecewa terhadap hasil pemilu yang selalu melakukan kampanye dan mengajak pihak lain agar tidak berpartisipasi dalam pemilu, mereka menolak berpartisipasi dalam pemilu menyebut dirinya sebagai golput<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *"Partisipasi Politik di Negara Berkembang"*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

<sup>6</sup>Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Umat* (Jakarta: Nimus Multima, 2004) , h. 93.



Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah karena ketidakpercayaan masyarakat yang juga dilatarbelakangi oleh kesadaran politiknya maka masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Hal semacam ini tentu tidak baik dalam perkembangan suatu mekanisme negara, karna negara yang ingin maju tentu harus didukung oleh kesadaran-kesadaran masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan tak tekecuali dalam politik. Yang berarti masyarakat perlu melakukan transformasi (perubahan) pola pikir agar dapat terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan data panitia pemungutan suara (PPS) Desa Pampang Tangguk Jaya, jumlah mata pilih atau yang berhak ikut partisipasi yakni berjumlah 1276 mata pilih. Yang menggunakan hak pilih pada pemilihan umum pada tahun 2014 yaitu 1175 masyarakat Pampang Tangguk Jaya menggunakan hak pilihnya sebagai suatu bentuk kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik. Sisanya 111 mata pilih masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya tidak menggunakan hak pilihnya.

Partisipasipolitik erat hubugannya dengan tingkat pendidikan. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kecenderungan seorang individu untuk berpartisipasi dalam politik. Sedangkan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang adalah tingkat buta huruf yang masih tinggi, partisipasi masih tergolong rendah karena

masyarakat masih belum sadar tentang apa yang terjadi dan dampak politik bagi kehidupan mereka<sup>7</sup>. Di negara berkembang, ada hubungan kuat antara pendidikan, kepentingan dan keterlibatan dalam politik, di beberapa negara berkembang, partisipasi bersifat otonom, artinya lahir dari mereka sendiri, masih terbatas. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi masalah untuk meningkatkan partisipasi itu.<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Pampang Tangguk Jaya yang lebih cenderung tidak mementingkan sistem politik yang ada, pengaruh pemahaman masyarakat terhadap politik yang cenderung rendah juga menjadi alasan tidak ikut serta nya dalam berpartisipasi. Maka tidak hayal banyaknya oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan akan politik yang ada dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat. Yang menjadi sebab partisipasi politik pun berjalan tidak sehat. Ada pun pengaruh ekonomi yang terjadi, akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan diikuti juga oleh ekonomi yang rendah maka banyaknya oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, seakan sudah menjadi rahasia umum jika banyak para oknum agar mereka terpilih sebagai pejabat dengan menggunakan cara yang tidak baik seperti *money politic*. Inilah yang mengakibatkan perpolitikan pada desa tertinggal atau pada

---

<sup>7</sup>Fahmi Arifudin, "Proposal Penelitian" (On-Line), Tersedia di <http://arifudinfahmi.blogspot.com>, 01 Desember 2013.

<sup>8</sup>Prof . Miriam Budiardjo. "*dasar-dasar ilmu politik*", (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.2008) h.23.

khususnya Desa Pampang Tangguk Jaya tidak stabil karena memang dihuni oleh orang-orang yang memang tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan arti politik secara hirarki.

Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan partisipasi di Desa Pampang Tangguk Jaya ini, dari orang-orang awam politik banyak diperjualbelikan (*Money politic*).

Dalam pasal 5 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suaramenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengancara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*”<sup>9</sup>.

Selain masalah *Money Politic*, kurang berjalan dengan baiknya partisipasi politik secara merata juga disebabkan karena faktor geografis seperti di Desa Pampang Tangguk Jaya ini orang-orang pedalaman yang memang sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang politik bahkan sampai tidak tersentuh/terdata oleh pihak penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum). Secara umum, yang terdapat didesa ini orang yang lebih sejahtera akan lebih aktif daripada orang yang tidak/ belum sejahtera, pria lebih aktif berpartisipasi aktif daripada wanita. Etnis grup yang dominan biasanya lebih aktif dibandingkan dengan minoritas.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap besar kecilnya partisipasi politik adalah Faktor personal, seperti:

---

<sup>9</sup>Undang-Undang RI Nomor.7 Tahun 2017 tentangPemilu.

- a) Watak masing-masing pribadi serta anggapan mereka terhadap aktifitas sosial
- b) Perasaan seberapa efektif langkah keterlibatan individu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.
- c) Intensitas perilaku politik
- d) Persepsi individu terhadap tugas-tugas sosial dan masyarakat<sup>10</sup>.

Jika suatu negara ingin masyarakatnya terlibat secara aktif dalam proses politik, maka pemerintah yang bersangkutan harus mengupayakan akses pendidikan setinggi-tingginya dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu partisipasi masyarakat akan tinggi dalam pemilu. Selain itu negara tersebut harus menerapkan sistem demokrasi dalam setiap sendi pemerintahan. Karena jika negara tersebut belum demokrasi maka penyelenggaraan pemilu yang benar-benar demokratis sulit untuk diwujudkan, ikut sertanya masyarakat luas bukan hanya didalam mengawasi aparat pemerintahan seperti birokrasi pemerintahan, perubahan didalam masyarakat biasanya dimulai dari sekelompok orang yang berhasil mengubah dasar statusnya didalam masyarakat, biasanya kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat yang banyak berhubungan dengan dan mengenal dunia luar lingkungannya sendiri, mereka telah mengenal berbagai pemikiran melalui pendidikan dan saluran-saluran komunikasi<sup>11</sup>.

Untuk melihat hal itu, tampaknya perlu dipahami bagaimana format partisipasi politik di beberapa negara berkembang yang menganut model pembangunan yang berbeda. Maka hal inilah yang menarik penulis untuk

---

<sup>10</sup> Ayi Sofyan, M.Si. *Eika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.29.

<sup>11</sup> Arbi Sanit, *"Sistem Politik Indonesia"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 108.



melakukan kajian lebih mendalam mengenai partisipasi politik khusus nya di Desa Pampang Tangguk Jaya.

Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاصْطَلِحُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَوَلَّوْا الْخِلْفَةَ الْأَخْرَىٰ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ الرِّسُولَ وَاللَّهَ إِلَىٰ فَرْدُهُ شَهِ  
تَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama'ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, disatu pemberontakan yang dilakukan terhadap ulil amri merupakan perbuatan tidak terpuji.

Ketidakloyalan masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling gunjing, ghibah, dan saling berprasangka buruk. Jika didalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin berlangsungnya kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Islam, baik secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karena Islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis telah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam Pemilihan Umum untuk memilih para kandidat ulim amri atau pemimpin secara langsung dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian dalam pandangan Islam pemilihan umum yang mungkin memunculkan konflik-konflik sosial yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian jelas-jelas sangat dilarang, sebaliknya dalam pandangan Islam suksesi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama. Artinya harus ada keselarasan antara pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Masyarakat di Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi politik di Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor secara lebih mendalam tentang partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung utara.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung utara.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Secara teoritis yaitu menambah hasanah keilmuan tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.
2. Secara praktis yaitu agar dijadikan referensi tambahan terkait dengan perkembangan politik yang Islam di Desa Pampang

Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung utara.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis atau sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi desa Pampang Tangguk yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden<sup>12</sup>.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *empiris analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.<sup>13</sup>

### 2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

---

<sup>12</sup>Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 10.

<sup>13</sup>Surtisno Hadi, *Metodelogi Reasearch* (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1985), h.3

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive Sampling* juga disebut *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian kriteria yang pantas dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Panitia Pemilihan
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Warga Desa.

Maka dalam hal ini penentuan sampel dalam penelitian ini diambil dari Kepala Desa Pampang Tangguk Jaya 1, 5 Panitia Pemilihan, 5 Tokoh Masyarakat dan 16 dari Warga Desa

### 3. Sumber data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk responden.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. yaitu itu berupa dokumen-dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat. Selain itu, data sekunder lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk



memperoleh data tersebut, teknik pengumpulandata dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan seorangpeneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan (yang diinginkan peneliti).

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada<sup>14</sup>.Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dalam pokok masalah yang peneliti ambil.

---

<sup>14</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),h.57-66

Dokumentasi bisa berupa data-data dari data Desa Pampang Tangguk Jaya ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

## **5. Analisis data**

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpung dan mengolah data yang sudah ditentukan, setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisis.<sup>15</sup>

Dalam menganalisis, peneliti mula-mula mengumpulkan data dengan pertanyaan kepada responden, kemudian peneliti menghitung satu-persatu dan mengklasifikasikan kesimpulan pertanyaan itu sehingga diketahui berapa jumlah persentase yang dihasilkan. Setelah itu, peneliti memadukan hasil pertanyaan kepada responden dengan

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004) h. 127.

wawancara, dengan menggunakan metode analisis dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

##### 1. Pengertian partisipasi politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara<sup>1</sup>.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik<sup>2</sup>.

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Syahril syarbini (dkk), *sosiologi dan politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) h.69.

<sup>2</sup> A.A Said Gatara, M.Si. *sosiologi politik* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), h.90.

<sup>3</sup> *Ibid*

Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya<sup>4</sup>.

Menurut Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya<sup>5</sup>.

Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat

---

<sup>4</sup>Syahrial Syarbini (dkk), *Op, Cit.*, h.380

<sup>5</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.367.

ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan<sup>6</sup>.

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

a. Keith Fauls

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.<sup>7</sup>

b. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihanpenguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

c. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*

Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud

---

<sup>6</sup>Ibid, 371

<sup>7</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Cendikia Cipta, 2005), h.56



sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif<sup>8</sup>.

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

## **2. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua *variabel* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua,

---

<sup>8</sup>Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.91.

menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya<sup>9</sup>.

Faktor yang berdiri sendiri artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status social dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arusurbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau mediakomunikasi secara luas.

---

<sup>9</sup>Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2001), h.124

2. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan caramencari dukungan massa.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikutserta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.<sup>10</sup>

Menurut Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa

---

<sup>10</sup> Ayi Sofyan, *Op, Cit., h.30*

akan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partaiipartai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.<sup>11</sup>

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislative 2014 memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka

---

<sup>11</sup> Suharno, "Faktor-faktor Partisipasi Politik" (On-Line) Tersedia di [www.donnyzetrost.co.id](http://www.donnyzetrost.co.id) april 2014

kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

#### 1. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena mengabaikan sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicitakan<sup>12</sup>.

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

- a. Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

---

<sup>12</sup>A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.288.

- b. Partisipasi politik spectator orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi politik gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengkritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.<sup>13</sup>

Orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Pemberian suara dalam pemilu 2014 merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Menurut Olsen partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial.<sup>14</sup> Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Michael Rush dan Philip Althoff, *Op, Cit., h. 76*



politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai bangunan umum<sup>15</sup>. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok

---

<sup>15</sup> Autor Ahsya Ahmad, "Prilaku dan Partisipasi Politik" (On-Line) Tersedia di [www.amaterasu7.blogspot.co.id](http://www.amaterasu7.blogspot.co.id) 17 January 2014

yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Dinegara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhataian dari berbagai kalangan<sup>16</sup>

#### 1. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Paigetinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal , dan partisipasi pasif.<sup>17</sup>

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Op, Cit.*, h.380

<sup>17</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: UNP Press, 2004) h.225

terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif)<sup>18</sup>.

Partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.<sup>19</sup>

Rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

a. Partisipasi politik konvensional

1. Pemberian suara atau voting
2. Diskusi politik
3. Kegiatan kampanye
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative

b. Partisipasi politik nonkonvensional

---

<sup>18</sup>Rahman H.I, *Op, Cit.*,h.287

<sup>19</sup>Seta Basri, Pengertian Partisipasi Politik, (On-Line) Tersedia di [www.setabasri01.blogspot.com](http://www.setabasri01.blogspot.com)februari 2009

1. Pengajuan petisi
2. Berdemonstrasi
3. Konfrontasi
4. Mogok
5. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran
6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Menurut David F. Roth dan Frank membentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.<sup>20</sup>

### **Piramida Partisipasi Politik**



*(David F. Roth dan Frank L. Wilson, 1976. The Comparative Study of Politics)*

<sup>20</sup> Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Op.Cit.*, h.88

Sumber : A Rahman HI 2007<sup>21</sup>

Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut dalam partisipasi pilbup yaitu bergabung dengan salah satu parpol di daerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi politik di daerahnya.

Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas

---

<sup>21</sup> Rahman H.I., *Op, Cit.*, h.286.

masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilbup. Serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik<sup>22</sup>.

#### a. Perilaku Memilih

Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu memilih atau tidak memilih. Sedangkan menurut Prihatmoko perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan.

##### 1) Perilaku Politik

Menurut Ramlan Surbakti secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan publik.<sup>23</sup>

Menurut Sudijono Sastroadmodjo perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masyarakat ada dalam suatu proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat<sup>24</sup>.

Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi

---

<sup>22</sup> *Ibid*

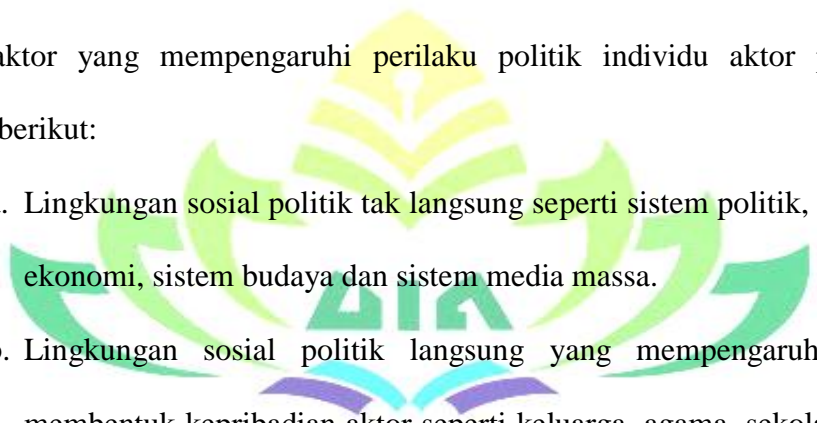
<sup>23</sup> Michael Rush dan Philip Althoff, *Op, Cit.*, h.89

<sup>24</sup> Henry Subiakto, *komunikasi Politik*, (Bandung: Graha Ilmu, 2005)h. 97



kepribadian politik. Yang dimaksud individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik yaitu tipe kepribadian otoriter, dan demokrat.

Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:

- 
- a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
  - b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan.
  - c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
  - d. Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan anacama dalam segala bentuknya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Amir Santoso, *Dinamika Politik Indonesia*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1994), h.210

## 2) Pendekatan dalam perilaku memilih

Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh negara yang demokratis.

Ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional.

- a. Menurut pendekatan struktural adalah kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai.
- b. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Maknanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- c. Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

- d. Pendekatan psikologi sosial, salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.
- e. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah<sup>26</sup>.

Pemilih rasional adalah mereka yang memiliki ciri khas tidak begitu mementingkan ideologi kepada kandidat dengan lebih mementingkan kemampuan calon kandidat dalam program kerjanya.

Pemilih kritis merupakan paduan dari tingginya orientasi dan kemampuan kandidat dalam masalah daerahnya, tingginya orientasi mereka terhadap ideologi. Pemilih inilah yang menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk kepada

---

<sup>26</sup>Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012) h.22

siapa akan menentukan pilihannya selanjutnya akan mengkritisi kebijakan pemerintah setelah menjabat.

Pemilih tradisional memiliki ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan kandidat sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam mengambil pilihannya. Pemilih tradisional adalah pemilih yang bias dimobilisasi dalam periode kampanye. Ciri khas pemilih ini adalah loyalitas yang tinggi.

Pemilih skeptis yang dimana tidak memiliki ideologi cukup tinggi dengan sebuah kandidat dan tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi sesuatu yang penting. Dari golongan pemilih skeptis akan memunculkan golongan putih (golput) dari bentuk keengganan dalam memberikan suaranya<sup>27</sup>.

### 3) Teori pilihan rasional

Dikemukakan oleh James S. Coleman teori rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tidak akan seseorang mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> A. Hoogerwerf, *Politikologi*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1985) h.189

<sup>28</sup> Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.184

Teori rasional memusatkan pada aktor. Menurut George Ritzer aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud.<sup>29</sup> Artinya aktor mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai tujuan, selain itu aktor juga mempunyai nilai dan pilihan. Teori ini tidak memandang apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi pilihan sumber aktor. Hal yang penting adalah aktor melakukan tindakan yang sesuai tujuan.

Menurut Cholisin pilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilihan pemula, maka pemilihan pemula sebagai aktor dalam pilbup mempunyai tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Tujuannya bermacam-macam sikap masa bodoh, lebih mementingkan kepentingan pribadi, sebagai reaksi protes terhadap pemerintah atau calon kandidat tidak sesuai dengan pilihannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> A. Hoogerwerf, *Op, Cit*, h. 196

### C. Partisipasi Politik Menurut Hukum Islam

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik di sini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang<sup>31</sup>.

#### 1. Konsep *Syura* dalam Islam

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara yusyawir* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.<sup>32</sup> Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip

---

<sup>31</sup>Inu Kencana Syafieie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h.242

<sup>32</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h. 18

konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam al-Qur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing.

Dua ayat yang menerangkan tentang musyawarah tersebut antara lain:

Al-Qur'an surat Ali-Imran: 159



عَفْ حَوْلِكَ مِنْ لَا نَفْضُ الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لَنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا  
 يَنْحُبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرِ فِي وَشَاوَرَهُمْ لَهُمْ وَأَسْتَغْفِرَ عَنْهُمْ فَ  
 ١٥٦ الْمُتَوَكَّلِ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya“. (Q.S. Ali-Imran: 159)

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.

Al-Qur'an surat Asy-Syura: 38

٣٨ مَعْلُومٍ يَوْمَ لَمِيقَاتِ السَّحَرَةِ فَجُمِعَ

Artinya: “Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum”(Q.S. Asy-Syura: 38)

Menanggapi ayat di atas, Farid Abdul Khaliq berpendapat bahwa ayat di atas mengandung penjelasan tentang sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk diantara ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat Ali-Imran: 159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah sistem hukum dalam Islam, maka surat Asy-Syura: 38 ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode hidup. Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga

mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

## 2. Pandangan Pemikir Islam tentang Konsep *Syura* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir-pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemikir-pemikir Islam tersebut misalnya:

### a. Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid, pada dasarnya prinsip *syura* (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistic dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar, adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan

tanggung jawab kemanusiaan. Sehingga demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *apriori* dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.

b. Amien Rais

Menurut Amien Rais, negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat. Musyawarah

atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu –bila tidak tercapai suatu konsensus– bisa dilakukan dengan *voting*, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara factual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap *legitimate* dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkauan nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu. Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarkhi, seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah disalah pahami sebagai penerapan ajaran Islam, padahal bukan. Sistem kerajaan atau monarkhi dimana kekuasaan dipegang

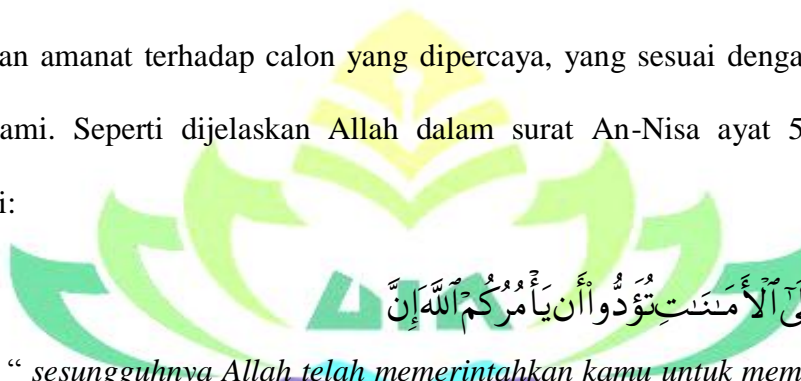
oleh raja secara turun temurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap ada di tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih dibenarkan oleh Islam. Dengan kata lain, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Saudi, sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat dan penguasa yang sebenarnya harus dipilih oleh rakyat secara periodik, sedang yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat

### 3. Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi. Ia mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satusatunya

alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutnnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur.

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:



﴿هَلْهِيَ إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَن يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: “ *sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang dipercaya untuk melaksanakan amanat tersebut.*” (QS.An-Nisa: 58)<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.370



Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam ( pemeluk agama Islam).<sup>34</sup>

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan prilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spriritual Islam”.<sup>35</sup>

Nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakan dalam sebuah Negara yang baik yaitu:

#### 1. Nilai keadilan

Nilai keadilan adalah “tidak berpihak” dan pada dasarnya seseorang yang adil harus berpihak yang benar. Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا

Artinya: ...apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia maka hendaklah engkau memutuskan dengan adi” (QS. An-Nisa: 58)

---

<sup>34</sup>M. Din Syamsuddin, Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2012), h.3

<sup>35</sup>Taufik Abdullah, *Op.Cit.*, h. 17

Berdasarkan ayat diatas prinsip keadilan merupakan suatu nilai kebaikan seseorang penguasa, dimana harus bertindak adil terhadap rakyatnya sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam (GBHI). Apabila seseorang penguasa kekuar dari jalur keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.

## 2. Nilai Kejujuran

Dalam terminologi Islam kata jujur adalah sidiq yaitu salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dinyatakan bahwa:



Artinya: *...dan katakanlah perkataan yang benar*” (QS. Al-Ahzab:70)

Berdasarkan ayat diatas, kejujuran menjadi pangkal hidup yang baik karena kejujuran mencegah perilaku menyimpang. Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapat masalah-masalah yang tetap tersembunyi dan motif-motif yang

juga tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas nilai kejujuran semua pihak.<sup>36</sup>

### 3. Nilai Kebebasan

Setiap masyarakat disetiap masa memiliki kondisi yang khas, sehingga masing-masing pandangan dan jalan yang berbeda-beda. Hakikat ini merupakan salah satu kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48 :

وَمِنْهَا جَاثِرَةٌ مِنْكُمْ جَعَلْنَا كُلَّ

Artinya: *...setiap manusia(masyarakat) diantara kamu, kami berikan aturandan jalanyang terang” (QS. Al-Maidah: 48)*

Berdasarkan ayat diatas dalam Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap warga negara untuk berfikir, berbicara dan berpendapat tidak dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah<sup>37</sup>.

### 4. Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan bukan berarti kemelaratan tetapi hidup sesuai dengan hasil kerja yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Nilai-nilai yang luhur harus diterapkan dalam kehidupan politik. Masyarakat bangsa indonesia dengan penerapan nilai Islami pada kehidupan politik

---

<sup>36</sup> Ari Darmastuti, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol I, 2005, h.63

<sup>37</sup> Kadar M. Yusuf, M. Ag. *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: paragonatama Jaya, 2013), h. 29

masyarakat. Akan mengubah pola pikir, dan tingkah laku individu atau masyarakat tersebut<sup>38</sup>.

Al-Quran memberikan tuntunan pada masyarakat:

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ يَقَوْمَ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ۚ

Artinya: ...sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada suatu kaum (masyarakat) sehingga mereka mengubah apa yang terdapat pada mereka” (QS. Ar-Rad: 11)

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa dalam suatu masyarakat atau pemerintah itu tergantung pada sikap mental pelakunya, masyarakat pun dituntut untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik. Untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Partisipasi politik yang disalurkan merupakan suatu prinsip etis yang mengharuskan bahwa proses politik dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik untuk menuju masyarakat madani.

Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat pada pemerintah yang berlaku dalam kehidupan taat kepada perintah atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu pemerintah merupakan suatu bentuk usaha dukungan atau dengan kata lain ikut berpartisipasi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ari Darmastuti, Op,Cit., h. 74

<sup>39</sup>M. Din Syamsuddin, Op, Cit., h.19

Dalam konteks ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

عَفِ فِي تَنَزُّعَاتٍ إِنَّ مِنْكُمْ أُولِيَ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ إِلَهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَى  
تَأْوِيلًا

Artinya: “hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul dan Ulilamri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS An-Nisa: 59)<sup>40</sup>

Berdasarkan ayat diatas kepatuhan terhadap pemimpin merupakan suatu kepatuhan terhadap suatu pemerintah yang berjalan. Pemimpin yang harus ditaati adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta konsekuen melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah dan menjauhi larangannya. Artinya ia memiliki integritas kepribadian, soleh pribadi, soleh sosial dan bertanggung jawab.

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Mahkota, 1987), h.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA PAMPANG TANGGUK JAYA KECAMATAN SUNKAI TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

### **A. Sejarah Singkat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara**

Pada bagian pendahuluan telah diuraikan bahwa lokasi penelitian adalah di kecamatan sungkai tengah Desa Pampang Tangguk Jaya. Lokasi penelitian diambil pada wilayah ini. Berikut dipaparkan gambaran mengenai Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah awalnya pecahan dari desa Kotanegara yang dimekarkan pada Tahun 1998 tersebut merupakan dusun kecil bernama dusun tangguk merupakan bagian dari desa Kotanegara.

Secara administratif Desa Pampang Tangguk Jaya mulai berdiri pada Tahun 2000 yang merupakan pemekaran dari desa Kotanegara. Setelah diresmikan menjadi Desa Pampang Tangguk Jaya persiapan yang menjadi pjs Kepala Desa adalah Bapak Hasan Mufli.

Nama dari Pampang Tangguk Jaya itu sendiri berasal dari sebuah pohon yang tangkainya membentuk seperti sebuah tangguk kemudian terbentuklah desa ini menjadi desa Pampang Tangguk Jaya.

Desa Pampang Tangguk Jaya mempunyai wilayah 983,15 Ha dengan batas-batas Kampung sebagai berikut :

1. Sebelah utara Desa Negara Kemakmuran ;
2. Sebelah timur Desa Galih Rejo;
3. Sebelah selatan Desa Negeri Campang Jaya ;
4. Sebelah barat Desa Bengkulu Tengah

Sejak berdiri pada tahun 1999 hingga 2015, ada beberapa program atau proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, ADP atau swadaya masyarakat.

### 1. Letak Geografis

Letak geografis Desa Pampang Tangguk Jaya hanya terdapat beberapa kawasan yang terdiri dari: kawasan hutan, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, kawasan rawa dan kawasan perdagangan.

Tabel 1

Letak Geografis

NO	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR
1	Kawasan Hutan	Ada
2	Kawasan Tambang	Tidak
3	Kawasan Pantai	Tidak
4	Kawasan Perbukitan / Pegunungan	Tidak
5	Kawasan Persawahan	Ada
6	Kawasan Perkebunan	Ada
7	Kawasan Peternakan	Tidak
8	Kawasan Industri Kecil / Rumah Tangga	Tidak
9	Kawasan Industri / Pabrik	Tidak
10	Kawasan Rawa	Ada



## 2. Jarak Kepusat Pemerintah

Tabel. 2  
Jarak Ke Pusat Pemerintah

NO.	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	11	Km
2	Ke Pemerintahan Kabupaten / Kota	45	Km
3	Ke Pemerintahan Provinsi	170	Km

Keterangan: Berdasarkan laporan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jarak Desa Pampang Tangguk kepusat pemerintah paling jauh berjarak 170 Km yaitu ke pemerintahan Provinsi.<sup>1</sup>

## 3. Data Penduduk

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender

Berikut adalah rincian jumlah penduduk Desa Pampang Tangguk Jaya

Tabel.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	Jumlah Penduduk	1.699 Orang	1.857 Orang
2	Jumlah Laki-laki	878 Orang	993 Orang
3	Jumlah Perempuan	821 Orang	864 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	399 KK	421 KK

---

<sup>1</sup> Tabulasi Data Potensi Desa Pampang Tangguk Jaya Tahun 2016

Berdasarkan laporan tabel tersebut, dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan jender di Desa Pampang Tangguk Jaya bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, dan jumlah kepala keluarga pada Tahun 2016 lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2015.<sup>2</sup>

#### 4. Kondisi Perekonomian

Jumlah potensi yang dimiliki penduduk Desa Pampang Tangguk Jaya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan sebagian kecil peternakan dan lainnya.

Tabel 4  
Mata pencarian penduduk Desa Pampang Tangguk Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	1.025
2	Peternakan	25
3	Pedagang	23
4	Pegawai Negeri Sipil	7
5	Perangkat Desa	12
6	Pengrajin	3

Sumber: Data Umum Desa Pampang Tangguk Jaya Tahun 2016

#### 4. Kondisi Sosial Budaya

Tabel.5  
Tingkat pendidikan penduduk Desa Pampang Tangguk Jaya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	210
2	Tamat SD/Sederajat	529
3	SLTP	458
4	SLTA	<b>279</b>

---

<sup>2</sup> Ibid

5	S-1 Keatas	15
---	------------	----

## 5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Desa Pampang Tangguk Jaya memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana dibidang pendidikan, keagamaan, dan sarana umum lainnya.

Tabel 6.

Sarana dan Prasarana Desa Pampang Tangguk Jaya

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa	1	
2	SDN	1	
3	Masjid	1	
4	Musholla	3	
5	Pasar	-	
6	Pos Kamling	5	
7	Jembatan	1	
8	Gereja	1	

*Sumber : Data Umum Desa Pampang Tangguk Jaya*

Pampang tangguk jaya merupakan sebuah desa di kabupaten Lampung Utara yang masyarakatnya masih memiliki tradisi lampung yang kuat. Pampang Tangguk Jaya terdiri dari 5 dusun yang terbagi dalam 10 RT.<sup>3</sup>

## B. Partisipasi Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Pada Saat Pemilu

Kondisi kehidupan masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya memiliki sikap terbuka merupakan rasa hormat terhadap kebebasan sesama manusia,

---

<sup>3</sup> Monografi Kelurahan Desa Pampang Tangguk Jaya, Tahun 2014

tidak dibenarkan dalam demokrasi suatu pemaksaan kehendak yang menjurus kepada anarkis.

Terlebih-lebih pada sosialisasi politik juga sangat penting dalam tingkat kesadaran suatu masyarakat dalam pesta demokrasi dimana dengan adanya sosialisasi politik yang baik, sosialisasi politik yang merata hingga kesadaran politik masyarakat di suatu desa terkhusus di suatu dusun itu terbangun, namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dalam pesta Demokrasi pada pilkada serentak kemarin banyak masyarakat yang tidak turut andil dalam melaksanakan pesta demokrasi tersebut, hingga partisipasi atau tingkat kesadaran memilih dan menggunakan hak suara mereka itu menurun di akibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki, pengaruh sosialisasi politik yang tidak merata dikarenakan hanya tugas dari KPU mengenai informasi dan sosialisasi masalah pemilihan umum itu tidak terlaksana ini di buktikan pada pesta Demokrasi yang terjadi Desa Pampang Tanguk Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah, pada pemilihan umum 2014.

Terkait mengenai sosialisasi politik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu yang tidak merata di tambah dengan kurangnya infrastruktur (listrik) yang kurang memadai hingga ada satu Dusun yang berada di Desa Pampang Tanguk Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah tersebut tidak merasakan listrik sama sekali, sehingga pendidikan politik serta sosialisasi politik hanya di rasakan pada masyarakat dusun lainnya saja.

Sehingga bentuk sosialisasi mengenai politik masyarakat di Desa Pampang Tanguk Jaya tersebut itu di sampaikan secara mulut ke mulut

atau *face to face* juga sosialisasi tersebut pula di terima dari pemuka agama atau imam-imam mesjit setempat, begitu pula apa yang dikatakan oleh Pak Damma selaku tokoh agama sekaligus imam Desa yang bertempat tinggal di Desa Pampang Tanguk Jaya dalam wawancaranya.

“mengenai masalah sosialisasi ketika ada pemilihan di Dusun kami ini, kami hanya dapat informasi dari tokoh-tokoh agama yang di mana di lakukan dari rumah ke rumah atau bicara langsung di masjid, hal ini terjadi karena pihak penyelenggara pemilu atau lembaga-lembaga politik tidak pernah sampai ke dusun kami ini di karenakan akses jalur naik ke Dusun kami rusak parah di tambah kondisi jalan yang becek, makanya mereka tidak pernah sampai kesini.”<sup>4</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya partisipasi politik tersebut di akibatkan kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam bidang inprastruktur jalan, listrik juga dalam bidan pendidikan, hingga inilah yang menjadi kendala hingga lasan oleh pihak penyelenggara sehingga mereka tidak pernah sampai ke Dusun tersebut untuk sosialisasi ketika adanya pemilihan atau pesta demokrasi.

Kondisi Desa Pampang Tanguk Jaya pada pemilihan umum tahun 2014 lalu dapat dikatakan aman karena masyarakatnya dan tokoh masyarakat di sana yang turut serta sangat antusias memilih dan menjaga keamanan dalam proses pemilihan berlangsung, sehingga kiranya ada konflik antara masyarakat yang berbeda calon atau pilihan sama sekali tidak terlihat seperti penuturan Ketua penyelenggara pemilu Bapak Adi Irawan dalam wawancara mengatakan.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pak Damma (46 tahun) Dusun Pattiro, Desa Pampang Tanguk Jaya, pada hari sabtu, tanggal 24 September 2016

“alhamdulillah tahun kmarin pada pemilihan partisipasi masyarakat berjalan dengan lancar karena masyarakat sangat antusia dalam pemilu karena sebelum-sebelumnya sudah ada di lakukan penyuluhan dari pihak PPS dan Panwaslu beserta tokoh-tokoh masyarakat, namun penyuluhan ini hanya di lakukan di dua Dusun saja, karena akses tidak memungkinkan, jadi semuanya alhamdulillah aman terkendali sampai pemiliha dan pembacaan kotak suara selesai walaupun ada satu dusun yang tidak pergi dalam penyuluhan dikarenakan jalan transportasi keatas jauh, rusak parah becek dan juga rumah di dusun tersebut agak berjauhan di samping itu masyarakat dusun tersebut sibuk berkebun di setiap harinya”.<sup>5</sup>

Selain melalui pengamanan dalam proses pemilihan berlanjut oleh masyarakat Desa Pampang Tanguk Jaya sehingga partisipasi politik masyarakat di anggap sukses, dalam proses penggunaan hak suara partisipasi politik masyarakat di Desa Pampang Tanguk Jaya menurun khususnya di satu dusun yakni Dusun Desa Pampang Tanguk Jaya di akibatkan karena kurangnya informasi yang sampai dari pihak penyelenggara pemilu.

Pada masyarakat Desa Pampang Tanguk Jaya kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam-macam bentuk dan intensitasnya. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu yang biasa nya tidak berdasarkan prakarsa sendiri seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya kecil sekali jumlah orang secara aktif dan separuhnya waktu melibatkan dari dalam politik.

Dengan hak aktif warga negara memperoleh kesempatan untuk ikut serta aktif dalam mengatur dan menyelenggarakan negara, sedangkan hak

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ketua penyelenggara pemilu Bapak Adi Irawan(62 tahun), pada hari Jum'at , tanggal 23 September 2016

pasif seorang warga negara ini biasanya dipilih, ditunjuk, ataupun diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, mata pilih yang terlihat langsung dalam pemilu merupakan suatu bentuk penyampaian aspirasi politik.

Berdasarkan data panitia pemungutan suara (PPS) Desa Pampang Tangguk Jaya, jumlah mata pilih atau yang berhak ikut partisipasi yakni berjumlah 1276 mata pilih. Yang menggunakan hak pilih pada pemilihan umum pada tahun 2014 yaitu 1175 masyarakat Pampang Tangguk Jaya menggunakan hak pilihnya sebagai suatu bentuk kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik. Sisanya 111 mata pilih masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan alasan *pertama* yaitu karena kurangnya sosialisasi pemilihan umum ke semua dusun-dusun dari penyelenggara pemilu maupun dari pihak pemerintahan, *kedua* minimnya sosialisasi pemilu ke semua dusun-dusun sehingga warga tidak mengerti cara menggunakan hak pilihnya sehingga faktor lainnya yaitu menyebabkan cara memilih yang rumit, *ketiga* dari kedua faktor tersebut menyebabkan kurangnya berpartisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sehingga masyarakat lebih mementingkan kesibukan lain seperti berladang, berkebun dan bekerja lainnya.

Hal ini ditunjang dengan pendapat yang diberikan oleh seorang bapak yang bernama Amir umur 47 tahun yang mengatakan:

*“pada pemilihan umum tahun 2014 saya tidak mengikuti pemilihan karna saya sedang diladang/dikebun mengurus lada jadi saya tidak sempat untuk*



*pulang ke kampung daripada saya pulang hanya untuk mengurus hal seperti itu mending saya fokus mencari nafkah saja”.*<sup>6</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pikir masyarakat desa Pampang Tangguk Jaya masih banyak yang kurang memiliki kesadaran akan berpartisipasi politik.

Dalam mengawasi penghitungan suara pada pemilu tahun 2014, dari 27 orang informan masyarakat yang diwawancarai yaitu terdapat 12 orang informan menyatakan cukup aktif ikut mengawasi penghitungan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dan 9 orang menyatakan aktif ikut mengawasi proses penghitungan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Desa Pampang Tangguk Jaya, Dapat dilihat 6 orang informan masyarakat kurang aktif mengawasi proses perhitungan suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 jadi dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam perhitungan suara adalah cukup baik.

Partisipasi masyarakat pada proses pemilihan umum tahun 2014, bahwa 27 orang informan masyarakat yang diwawancarai yaitu 15 orang menyatakan jarang/cukup aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan umum pada tahun 2014 di desa pampang tangguk jaya. 9 orang menyatakan sering/aktif dalam proses pemilu pada tahun 2014 di desa pampang tangguk jaya, kemudian 3 orang menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam proses pemilihan umum pada tahun 2014 di desa pampang tangguk jaya.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Amir (47 tahun), pada hari Minggu , tanggal 25 September 2016

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum di desa pampang tangguk jaya kurang baik karena masyarakat jarang berpartisipasi dalam proses seleksi ini.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilu tahun 2014, Dari 27 orang informan masyarakat yang diwawancarai 8 orang menyatakan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum pada tahun 2014 di desa pampang tangguk jaya, kemudian 19 orang informan masyarakat menyatakan ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum pada tahun 2014 di desa pampang tangguk jaya. Hal ini mengutip dari pendapat yang diberikan oleh ibu Melina yang berusia 55 tahun yang mengatakan bahwa

*“buat apa memilih jika nantinya Kepala Daerah/Anggota Dewan tidak dapat bekerja dengan baik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Suara yang saya berikan nantinya akan sia-sia. Mereka hanya mengumbar janji-janji saja saat pemilihan akan tetapi setelah mendapatkan kursi lupa akan janjinya untuk mensejahterakan masyarakat, dapat dilihat pada yang sebelum-sebelumnya. Jadi mending saya tidak memilih”*

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum pada tahun 2014 di desa pampang tangguk jaya adalah kurang baik karna banyak masyarakat yang tidak memilih.

### **C. Faktor-Faktor Tidak Ikut Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014**

Faktor penghambat dan pendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu yang pertama yaitu faktor pendidikan, faktor pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya karena pendidikan yang masih relatif minim, dapat dilihat pada tabel 5 bahwa

masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya masih banyak sekali yang hanya lulusan SD yaitu sekitar 529 orang, bahkan ada 210 orang yang tidak lulus SD, dari data tersebut sangat jelas terlihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat memang masih sangat kurang terhadap hal apapun termasuk juga dibidang politik, tingkat pengetahuan masyarakat tersebut sangat berpengaruh pada kesadaran akan hak politik mereka, masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya cenderung lebih tidak mementingkan sistem politik yang ada, dari hal tersebut pengaruh pemahaman masyarakat terhadap politik yang cenderung rendah juga menjadi alasan tidak ikut sertanya masyarakat pada pemilihan umum, yang menimbulkan terjadinya Golput. Dengan hal tersebut banyaknya oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan akan politik yang ada dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat.

Adapun pengaruh ekonomi yang terjadi dari tabel 4 dapat dilihat bahwa mata pencarian masyarakat rata-rata adalah petani yaitu sekitar 1025 orang dan hanya 7 orang sebagai PNS. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya memang berada pada kelas menengah kebawah. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan diikuti juga oleh faktor ekonomi yang rendah maka banyak nya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, seakan sudah menjadi rasasia umum pada masyarakat jika banyak para oknum agar mereka terpilih menjadi pejabat dengan menggunakan cara yang tidak baik seperti *Money Politic*. Hal inilah yang mengakibatkan perpolitikan di Desa Pampang

Tangguk Jaya tidak stabil karena memang dihuni oleh orang-orang awam politik yang memang tidak memahami dengan baik apa maksud dan arti politik secara hirarki, sehingga masih banyak suara masyarakat yang diperjual belikan.

Selain pengaruh pendidikan dan ekonomi, kurang berjalan dengan baiknya partisipasi politik secara merata di Desa Pampang Tangguk Jaya ini juga disebabkan karena faktor geografis seperti yang terlihat pada tabel 2 bahwa di desa ini orang-orang pedalaman yang memang sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang politik bahkan hampir tidak tersentuh/terdata oleh pihak penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum – KPU) terlihat bahwa jarak antara Desa Pampang Tangguk Jaya ke pemerintahan kecamatan berjarak sekitar 11km, ke pemerintahan kabupaten sekitar 45km dan ke pemerintahan provinsi sekitar 170km . Secara umum, yang terdapat di desa ini orang yang lebih sejahtera akan lebih aktif daripada orang yang tidak/ belum sejahtera, pria lebih aktif berpartisipasi aktif daripada wanita. Etnis grup yang dominan biasanya lebih aktif dibandingkan dengan minoritas, orang-orang dewasa biasanya juga lebih aktif dibandingkan dengan orang yang sangat tua, ataupun anak-anak dan remaja.

Adapun faktor-faktor lainnya yaitu dari 27 informan yang diwawancarai: 7 orang informan mengatakan bahwa faktor-faktor masyarakat tidak berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 2014 yaitu karena kurangnya sosialisasi, 10 orang informan mengatakan bahwa faktor lainnya

yaitu karna cara memilih yang rumit, kemudian 10 orang informan lain nya mengatakan bahwa faktor-faktor masyarakat kurang berpartisipasi yaitu karna adanya kesibukan lain/mementingkan pekerjaan lain.

Hal ini ditunjang dengan pendapat yang diberikan oleh seorang bapak yang bernama Amir umur 47 tahun yang mengatakan

*“pada pemilihan umum tahun 2014 saya tidak mengikuti pemilihan karna saya sedang diladang/dikebun mengurus lada jadi saya tidak sempat untuk pulang ke kampung daripada saya pulang hanya untuk mengurus hal seperti itu mending saya fokus mencari nafkah saja”*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pikir masyarakat desa Pampang Tangguk Jaya masih banyak yang kurang memiliki kesadaran akan berpartisipasi politik.

Kemudian dari 27 informan masyarakat mengatakan bahwa 6 orang mengatakan tidak pernah ikut dalam kampanye pemilu 2014 , 11 orang informan mengatakan jarang ikut berpartisipasi dalam kampanye pemilu 2014. Kemudian 10 dari orang informan mengatakan sering ikut berpartisipasi dalam kampanye pemilu 2014.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya dalam pemilu masih kurang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih kurang terbuka terhadap politik yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang kurang, terlihat pada saat kampanye pada pemilihan umum tahun 2014 kurang baik karna masih ada masyarakat

yang enggan mengikuti kampanye tersebut, itu membuktikan bahawa pola pikir masyarakatnya dengan politik masih kurang.

#### **D. Pendapat Warga Tentang Pemilu Didaerah Setempat**

a. Pendapat warga terhadap pemberian suara dalam pemilihan umum 2014

Partisipasi politik merupakan suatu bagian dalam kehidupan politik dimana masyarakat Desa Pampang Tanguk Jaya banyak memilih bentuk partisipasi politik yang tidak banyak menyita waktu dalam pelaksanaannya.

Dari 27 informan 20 orang yang menjawab ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum tahun 2014, dan sisanya 7 orang memilih tidak ikut memberikan suara. Dari rincian diatas sebagian besar masyarakat Desa Pampang Tanguk Jaya menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk kesadaran politik untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi politiknya.

b. Tanggapan masyarakat menjadi pengurus partai politik

Kehidupan politik manusia membutuhkan wadah atau tempat yang dijadikan alat untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan akan wadah dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat butuh suatu tempat yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat menjadi pengurus partai politik. Dari 27 informan, 10 orang informan mengaku menjadi pengurus partai, 8 orang informan menjawab kadang-kadang atau kurang aktif dalam keanggotaan partai politik dan sisanya 9 orang

menjawab tidak ikut menjadi pengurus partai politik. Ketidak ikut sertaan masyarakat menjadi pengurus partai politik disebabkan ketidak tahuan masyarakat akan fungsi partai politik dan kebanyakan masyarakat yang enggan melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan politik praktis karena dengan melibatkan diri langsung maka akan banyak menyita waktu dan aktifitas sehari-hari.

c. Tanggapan masyarakat terhadap kegiatan kampanye

Tindakan seorang calon pemimpin yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan merupakan tindakan politik yang mencakup dukungan dari masyarakat adalah kegiatan kampanye. Untuk mengetahui sejauh mana keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari 27 orang informan 10 orang informan menjawab ikut dalam berkampanye, 11 orang informan menjawab kadang-kadang, karena masyarakat enggan melibatkan diri secara langsung mendukung calon-calon disebabkan kesibukan kerja yang tidak dapat ditinggalkan dan sisanya yang tidak ikut berkampanye 6 orang informan dengan alasan tidak tahu akan adanya kampanye oleh calon legislatif.

Dengan demikian bahwa umumnya informan ikut dalam berkampanye disebabkan masyarakat mendapat keuntungan dari segi materi meskipun tidak seberapa dan masyarakat mendapat keuntungan

dari atribut atau kaos calon legislatif yang dibagi secara cuma-cuma atau gratis.

d. Tanggapan masyarakat terhadap orang-orang golput

Manusia pada umumnya memiliki faktor kebiasaan dalam segala kondisi dan mempunyai kenyamanan ketika berubah. Maka akan terasa ada yang lain dari kebiasaan sebelumnya, tetapi terkadang setiap manusia punya penilaian tersendiri dalam menentukan sikap politik yang diambil.

Dari 27 informan, 6 orang informan menjawab setuju golput merupakan bentuk suatu politik, 15 orang informan menjawab bukan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat karena dengan alasan tidak ikut memilih atau tidak ikut berpartisipasi dan sisanya 6 memilih tidak tahu karena ideologi dan sikap politik manusia berbeda-beda dalam menanggapi fenomena politik.



## **BAB IV**

### **ANALISA PARTISIPASI POLITIK**

#### **A. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Desa Pampang Tangguk Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab.Lampung Utara**

Dari berbagai serangkaian perkembangan politik yang terjadi dalam kurun waktu selama ini baik itu rezim orde lama maupun orde baru hingga massa reformasi sekarang dari tahun ke tahun, perubahan-perubahan dan perkembangan akan pentingnya kesadaran politik bagi masyarakat nampak begitu drastis terjadi dimasyarakat. Hal demikian terjadi tentunya karna adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesadaran akan pentingnya politik bagi masyarakat.

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam suatu negara, kesadaran politik warga negara merupakan faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, yang terdiri dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor social dan faktor personal individu masing-masing.

Yang pertama yaitu faktor pendidikan, partisipasi politik erat hubungannya dengan tingkat pendidikan. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kecenderungan seorang individu untuk berpartisipasi dalam politik, Pendidikan berpengaruh sangat penting terhadap kesadaran partisipasi politik masyarakat, bahwa pola pikir masyarakat desa Pampang Tangguk Jaya masih banyak yang kurang memiliki kesadaran akan berpartisipasi politik dikarenakan pendidikan masyarakat yang mayoritas pendidikannya hanya sampai SMP.

Yang kedua yaitu faktor ekonomi, akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan di ikuti juga oleh ekonomi yang rendah maka banyaknya oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, seakan sudah menjadi rahasia umum jika banyak para oknum agar mereka terpilih sebagai pejabat dengan menggunakan cara yang tidak baik seperti *money politic*. Inilah yang mengakibatkan perpolitikan pada Desa Pampang Tangguk Jaya tidak stabil karena memang dihuni oleh orang-orang yang memang tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan arti politik secara hirarki. persepsi individu terhadap tugas-tugas sosial dan masyarakat

Hal ini dibuktikan dengan ungkapan salah satu responden pada saat wawancara *“pada pemilihan umum tahun 2014 saya tidak mengikuti pemilihan karna saya sedang diladang/dikebun mengurus lada jadi saya tidak sempat untuk pulang ke kampung daripada saya pulang hanya untuk mengurus hal seperti itu (memilih calon yang dianggap tidak akan*

*amanah) mending saya fokus mencari nafkah saja untuk keluarga dan sekolah anak-anak saya”*

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa hal tersebut merujuk pada permasalahan ekonomi kemudian secara sistematis semacam ini maka para pelaku politik memanfaatkannya untuk kepentingan politik.

Yang ketiga faktor social, Secara umum, yang terdapat di desa ini orang yang lebih sejahtera akan lebih aktif daripada orang yang tidak/ belum sejahtera, pria lebih aktif berpartisipasi aktif daripada wanita, Etnis grup yang dominan biasanya lebih aktif dibandingkan dengan minoritas.

Adapun faktor personal individu lainnya yang terdiri dari, watak masing-masing pribadi serta anggapan mereka terhadap aktifitas sosial, Perasaan seberapa efektif langkah keterlibatan individu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, intensitas perilaku politik dan

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara**

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Jika dilihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya dalam menyampaikan aspirasi politik merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya pada saat pemilu merupakan implementasi ajaran Islam terhadap kehidupan politik masyarakat.

Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya mayoritas beragama Islam, penerapan nilai Islam dalam memberikan dukungan kepada calon legislatif berdasarkan sikap yang independen didasari oleh nilai kebebasan dalam memilih yang artinya masyarakat dapat memilih berdasarkan kemauan sendiri dan tanpa paksaan siapapun. Namun pada realitas yang ada masyarakat tidak mengikuti nilai Islam tersebut karena masih banyak masyarakat yang suaranya dapat dibeli oleh oknum-oknum tertentu yang artinya *money politic*.

Islam memahami kebebasan merupakan nilai kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk berfikir berbicara dan berpendapat. Islam tidak melarang selama selaras dengan tuntutan Al-Quran dan Hadist. Karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi hak dalam Islam pun dalam menyampaikan aspirasi politik tidak ada paksaan dalam memilih atau dipilih. Namun berbeda hal pada Desa Pampang Tangguk Jaya yang masih ada keterbatasan kebebasan dalam memilih nya dikarenakan oleh berbagai faktor sehingga suara mereka dapat dibeli, pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang dengan mengatas namakan Infaq dan Shodaqoh, pemberian barang seperti sembako

pakaian, dan seperangkat alat sholat. Dan sebagian masyarakat masih menerima hal tersebut.

Disisi lain ada ulama yang mengeluarkan fatwa bahwa masyarakat diwajibkan ikut berpartisipasi dalam pemilu atau pun golput adalah haram. Tapi disebagian sisi sebagian ulama tidak sependapat dengan fatwa tersebut, sebagai ulama memandang bahwa hukum turut serta dalam pemilu adalah wajib. Oleh karena itu sikap Golput dihukumi haram sedangkan sebagian ulama lagi tidak berpendapat demikian.

Golput sering pula didefinisikan sebagai orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih, namun pada intinya golput adalah sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, tapi golput juga bukan sikap politik yang tidak bertanggung jawab, melainkan lebih merupakan tantangan bagi calon yang terpilih.

Dari berbagai bentuk partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya, sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan menyimpang dari nilai-nilai Islam. Perbedaan pendapat dan kepentingan merupakan hal yang wajar, tetapi prinsip menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kunci utama kekuatan dan kemenangan. Selama persatuan dan kesatuan masih dibina oleh aqidah yang kokoh.

Oleh karena itu, banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan dalam pemilihan umum legislatif yang berkaitan dengan kondisi social,ekonomi, dan pendidikan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara masih cenderung kurang baik dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang masih cenderung rendah yang disebabkan oleh faktor pendidikan yang masih rendah, perbedaan-perbedaan ekonomi, sampai kepada lingkungan sosial masyarakat, dan juga faktor personal individu masing-masing. Kurangnya kesadaran politik masyarakat mengakibatkan banyaknya suara masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya banyak di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik.
2. Tinjauan Islam terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara yaitu Islam tidak mengharuskan model pasti dalam menyampaikan aspirasi politiknya, konsep Islam dalam partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap pemimpin. Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

dalam menyampaikan aspirasi politiknya berbeda-beda, perbedaan pendapat dan kepentingan merupakan hal yang wajar. Tetapi prinsip menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kunci utama kekuatan dan kemenangan. Selama persatuan dan kesatuan masih dibina oleh aqidah yang kokoh. Namun masih ada masyarakat yang tidak mengikuti nilai Islam karena masih banyak masyarakat yang suaranya dapat dibeli oleh oknum-oknum tertentu yang artinya *money politic*.

## **B. Saran-Saran**

Dari kesimpulan ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi politik harus prakarsa sendiri jangan terpengaruh intimidasi atau rayuan dari calon pemimpin dalam kata lain menggunakan hati nurani.
2. Kepada masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya apabila hendak berpartisipasi politik dalam pemilihan umum harus objektif pilihlah calon yang amanah untuk menuju kesejahteraan masyarakat dan tetap mengikuti ajaran Islam.



## DAFAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik, *Islam dan masyarakat*, (Jakarta: Pantulan Sejarah Indonesia, 1987.
- Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: Mizan, 2002.
- A.Hoogerwerf, Politikologi, Jakarta: PT.Erlangga, 1985.
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria. Hukum dan Hukum Islam. Bandar Lampung: Penerbit Universias Lampung 2008.
- Budiardjo Miriam. “dasar-dasar ilmu politik”. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi. 2008.
- Bakker Anton. Metode-Metode Filsafat. Jakara: Ghalia Indonesia, 1984.
- Bakir R Suyoto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Batam: Karisma. 2006.
- Darmastuti Ari, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol I, 2005.
- Deparemen Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Pendidikan Nasional.
- Efriza, Political Explore, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Gatara A.A Said, *sosiologi politik* ,Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007.
- Huntington Samuel P dan Joan Nelson. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Nazir Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Rahman A., Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rush Michael dan Althoff Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Sanit Arbi. Sistem Politik Indonesia. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Santoso Amir, Dinamika Politik Indonesia, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1994.

Sofyan Ayi, Eika Politik Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012

Syafei Inu Kencana, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syamsuddin M. Din, Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2012.

Said Moh. Dzulkiah, *Sosiologi Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarbini Syahrial, *sosiologi dan politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Tanzeh Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Zaidan Abdul Karim Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Syareat Islam. Jakarta: Pustaka Amani. 1982.